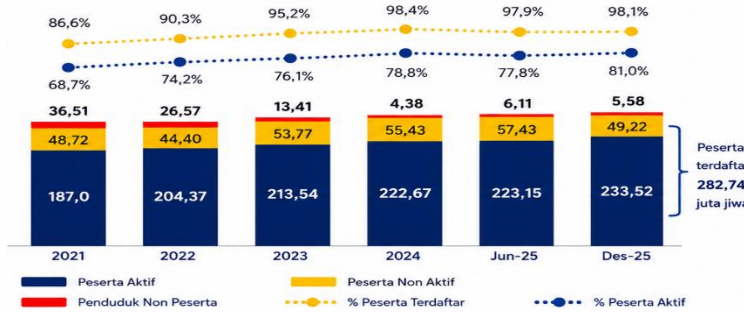


Monthly Report Monitoring JKN

31 Desember 2025

Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan



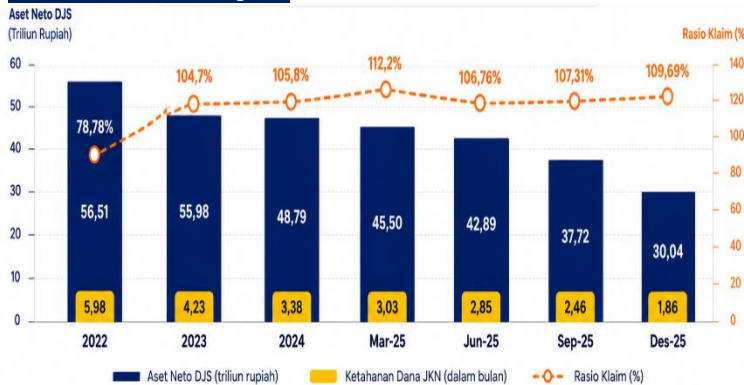
Sumber : BPJS Kesehatan dan Dukacil Kemendagri, diolah

SEGMENT PESERTA	AKTIF	NON AKTIF MENUNGGAK	NON AKTIF MUTASI	TOTAL PESERTA TERDAFTAR
Penerima Bantuan Iuran (PBI)	96.693.367	-	16.862.338	113.555.705
PPU Penyelenggara Negara	19.823.475	20.824	717.856	20.562.155
PPU Non Penyelenggara Negara	38.780.659	121.916	7.792.079	46.694.654
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	17.568.049	13.744.397	1.676.734	32.989.180
Bukan Pekerja (BP)	5.010.436	30.693	374.167	5.415.296
- BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.563.154	-	331.804	4.894.958
- BP Swasta (BP Non PN)	447.282	30.693	42.363	520.338
PBPU Pemda	55.646.946	-	7.875.522	63.522.468
TOTAL PESERTA	233.522.932	13.917.830	35.298.696	282.739.458

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Peserta non aktif dikarenakan menunggu sejumlah 13,9 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 13,7 juta (98,8%). Peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 35,3 juta, yang terdiri dari 16,86 juta dari segmen PBI, dan sebesar 7,87 juta dari segmen PBPU Pemda. Sebesar 7,79 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh perubahan status pekerjaan dan belum menentukan segmen kepesertaan JKN, 717,85 ribu peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lainnya.

Kondisi Kesehatan Keuangan



Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai 1,86 bulan kedepan (**sehat, namun rentan defisit**). Tanpa adanya bauran kebijakan segera, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan diproyeksikan mengalami risiko defisit aset neto pada tahun 2026. Perolehan **YoI DJS Kesehatan** sebesar 5,9% atau Rp3,9 triliun, dengan rata-rata kelolaan dana investasi sebesar Rp66,9 triliun selama Januari 2025 hingga Desember 2025, terbagi pada surat utang negara sebesar Rp18,29 triliun (27,1%), deposito sebesar Rp44,8 triliun (66,3%), dan SRBI sebesar Rp2,7 triliun (3,1%), target **YoI** sebagaimana Indikator Capaian Kinerja (ICK) tahun 2025 yang ditetapkan DJSN sebesar 7%.

Dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2025 ditetapkan 3,55% dari penerimaan iuran program JKN, dan atau maksimal Rp5,98 triliun sebagaimana PMK 134/2024. Realisasi **Beban terhadap dana operasional + pendapatan investasi (BOPO)** berada diposisi **91,52%**, masih sesuai ketentuan Permenkeu 251 Tahun 2016 yang mengamahkan maksimal BOPO sebesar 95%. **YoI BPJS Kesehatan** tercapai sebesar 10,17% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp1,1 triliun dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp11,09 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan telah mencapai target yang ditetapkan oleh DJSN dalam ICK Tahun 2025 sebesar 7%.

Cakupan kepesertaan JKN Per 31 Desember 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,1% dari penduduk Indonesia Tahun 2025. Cakupan peserta tumbuh 4,6 juta (1,6%) dibanding 31 Desember 2024. Berdasarkan cakupan peserta yang hampir menyeluruh, maka fokus dan strategi saat ini lebih menekankan pada menjaga dan meningkatkan keaktifan peserta JKN, khususnya sektor informal.

Capaian **kepesertaan aktif** sebesar 233,52 juta jiwa atau 81,0% dari jumlah penduduk, dan 82,59% dari keseluruhan peserta, peserta aktif tumbuh 4,88% atau 10,85 juta jiwa dibanding 31 Desember 2024, penambahan/penurunan peserta aktif didorong oleh beberapa segmen berikut :

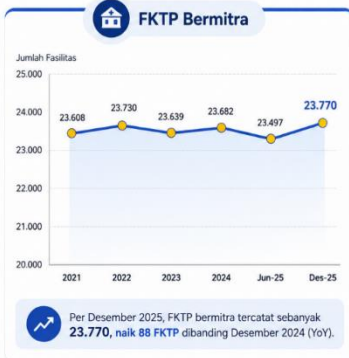
- **PBI JK** +8,8 ribu jiwa (+0,01%)
- **PPUPN** +882,65 ribu jiwa (+4,66%)
- **PPUBU** +1,3 juta jiwa (+3,56%)
- **PBPU** +355,15 ribu jiwa (+2,06%)
- **BP** +55,33 ribu jiwa (+1,08%)
- **PBPU Pemda** +8,22 juta jiwa (+17,33%)

Per 31 Desember 2025, program JKN mencatatkan defisit operasional yang menyebabkan **penurunan aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp18,36 triliun (YTD)**. Hal ini terjadi karena realisasi beban jaminan kesehatan sebesar Rp192,7 triliun telah melampaui pendapatan iuran sebesar Rp176,7 triliun, sehingga menghasilkan **rasio klaim sebesar 109,05%**. Perolehan kolektibilitas iuran mencapai 99,49% per Desember 2025. Tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% ini telah berlangsung konsisten sejak 2023, menunjukkan bahwa total pendapatan belum mampu mengimbangi tingginya biaya layanan kesehatan, yang berisiko pada sustainabilitas keuangan JKN.

Monthly Report Monitoring JKN

31 Desember 2025

Kerjasama Faskes dan Utilisasi



Per Desember 2025, **kerja sama dengan FKTP** tercatat sebanyak 23.770, naik 88 FKTP dibanding 31 Desember 2024. Penambahan terjadi didorong oleh Klinik Pratama yang bertambah 225 mitra, diikuti penambahan pada Puskesmas sebanyak 26, Klinik TNI dan Polri yang masing-masing bertambah 3 FKTP, dan RS D Pratama bertambah 1 lokasi. **Kerja sama FKRTL tercatat 3.194**, bertambah 32 dibanding akhir 2024. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 4.938 apotek dan 1.252 optik sebagai fasilitas kesehatan Penunjang. Capaian jumlah kerja sama FKTP dan FKRTL telah memenuhi target ICK 2025 yang ditetapkan oleh DJSN.



Tingkat Lanjt (RJTL) sebesar 30,5%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,1%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3%, dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,6% dari total beban jaminan.



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Mayoritas kelompok INA-CBG's RITL pada November 2025 menunjukkan penurunan volume layanan dibandingkan November 2024, kecuali beberapa kasus spesifik. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pola rujukan dan/atau pergeseran layanan dengan kendali mutu dan kendali biaya yang lebih optimal. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kebijakan kendali mutu dan biaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga tidak menimbulkan hambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat diberikan di tingkat lanjutan.

Pemanfaatan layanan kesehatan hingga 31 Desember 2025 meningkat sebanyak 7,6% dibanding Desember 2024. Pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 728,8 juta kunjungan, mengalami peningkatan 10% atau bertambah 51,4 juta dibanding Desember 2024. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 143,1 juta kunjungan, menurun 0,3%. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 18,3 juta kunjungan, menurun 0,9% dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 3,5 juta, meningkat 17,1%. Berdasarkan hal tersebut, fungsi *gatekeeper* FKTP semakin optimal dalam menyerap tingginya kebutuhan layanan primer peserta JKN. Efisiensi ini dipertegas dengan keberhasilan menekan beban di layanan yang lebih mahal, yaitu penurunan kunjungan RJTL dan RITL, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan efektifitas biaya Program JKN.

Beban Jaminan pada Desember 2025 mengalami peningkatan 8,8% dibanding Desember 2024, dari Rp174,9 triliun menjadi Rp190,3 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi oleh Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp107,6 triliun atau 56,5% dari keseluruhan beban jaminan, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjt (RJTL) sebesar 30,5%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,1%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3%, dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,6% dari total beban jaminan.

Pembayaran manfaat RJTL per Desember 2025 mencapai Rp58,1 triliun, naik 8,7% dibanding pembayaran manfaat RJTL pada Desember 2024. Jumlah kunjungan RJTL adalah sebesar 143,1 juta kunjungan, diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal, prosedur dialisis, perawatan luka, penyakit akut kecil-kecil lain, dan lain sebagainya. Penurunan beberapa kasus terbesar CBG's RJTL adalah indikasi efektifitas kendali mutu dan kendali biaya.

Pembayaran manfaat RITL hingga Desember 2026 mencapai Rp97,5 triliun, meningkat 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kasus terbanyak didominasi oleh persalinan dengan operasi bedah caesar ringan, nyeri abdomen & gastroenteritis, disusul oleh infeksi non bakteri (ringan).